



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong Triwulan I Tahun 2026 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran program dan indikator kinerja PPN Brondong Tahun Anggaran 2026.

Penyusunan Laporan Kinerja PPN Brondong mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang memiliki manfaat sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi kepada masyarakat, serta sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja pegawai di lingkungan PPN Brondong. Penilaian kinerja didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Melalui analisis dan evaluasi yang objektif, laporan ini diharapkan dapat mendorong optimalisasi peran organisasi serta peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

Lamongan, 13 April 2026
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Brondong



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas Dan Fungsi.....	2
1.3. Struktur Organisasi dan SDM PPN Brondong	3
1.4. Permasalahan.....	4
1.5. Sistematika Penyajian.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
2.1. Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2026	6
2.2. Rencana Aksi Penetapan Kinerja.....	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	11
3.2. Realisasi Anggaran	35
BAB IV PENUTUP	36
LAMPIRAN	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perjanjian Kinerja PPN Brondong Tahun 2026	6
Tabel 2 Alokasi Anggaran PPN Brondong Tahun 2026	7
Tabel 3 Rencana Aksi PPN Brondong Tahun 2026	8
Tabel 4 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026	11
Tabel 5 Jenis Penerimaan PNPB di PPN Brondong	12
Tabel 6 Capaian Penerimaan PNPB Non SDA di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2026	13
Tabel 7 Perbandingan Capaian Penerimaan PNPB Non SDA di PPN Brondong Periode Sebelumnya	13
Tabel 8 Capaian Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2026	14
Tabel 9 Perbandingan Capaian Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Brondong Periode Sebelumnya	15
Tabel 10 Capaian Tingkat Kinerja PPN Brondong Triwulan I Tahun 2026	17
Tabel 11 Perbandingan Capaian Tingkat Kinerja di PPN Brondong Periode Sebelumnya	17
Tabel 12 Capaian Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2026	20
Tabel 13 Perbandingan Capaian Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Brondong Periode Sebelumnya	20
Tabel 14 Capaian Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2026	22
Tabel 15 Perbandingan Capaian Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan Periode Sebelumnya	22
Tabel 16 Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2026	25
Tabel 17 Perbandingan Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di PPN Brondong Periode Sebelumnya	26
Tabel 18 Capaian Tingkat Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2026	30
Tabel 19 Perbandingan Capaian Tingkat Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Brondong Periode Sebelumnya	30
Tabel 20 Capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2026	34
Tabel 21 Perbandingan Capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup PPN Brondong Periode Sebelumnya	34
Tabel 22 Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan PPN Brondong Triwulan I Tahun 2026	35

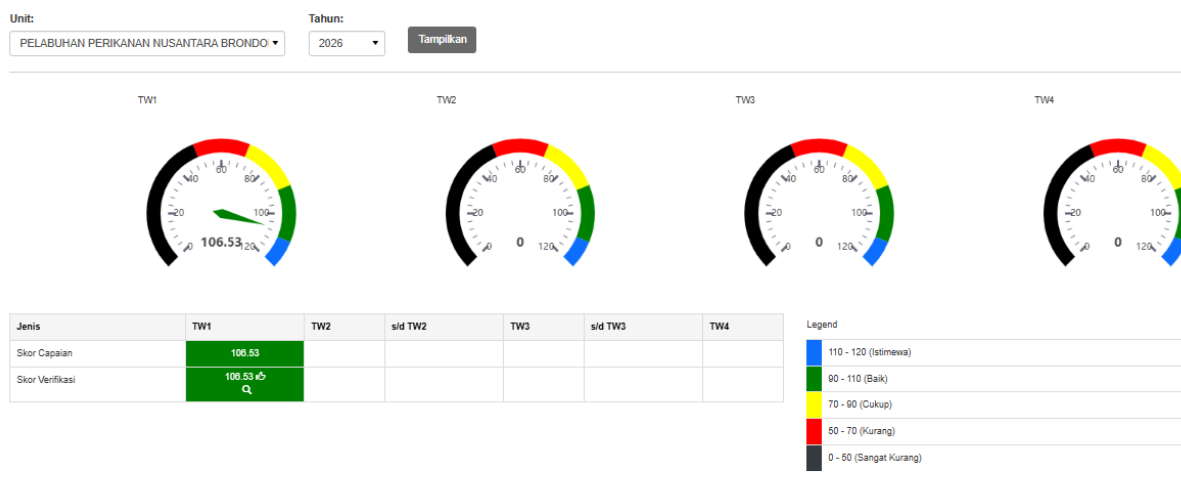
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tampilan Dashboard Kinerja PPN Brondong	v
Gambar 2 Struktur Organisasi PPN Brondong 2026	3
Gambar 3 Komposisi Pegawai PPN Brondong Tahun 2026	4
Gambar 4 Bentuk dan Format Laporan Kinerja Tahun 2026	5
Gambar 5 Grafik Capaian Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2026	13
Gambar 6 Grafik Capaian Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2026	15
Gambar 7 Grafik Capaian Tingkat Kinerja di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2026	17
Gambar 8 Grafik Capaian Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2026	20
Gambar 9 Grafik Capaian Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2026	22
Gambar 10 Status Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Aplikasi SIDAK	26
Gambar 11 Rekapitulasi Tingkat Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Triwulan I Tahun 2026	30
Gambar 12 Hasil Penyelenggaraan SKM Triwulan I Tahun 2026 Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	34

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan di pelabuhan perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap.

Pada Tahun 2026, PPN Brondong mendapatkan alokasi awal anggaran sebesar Rp. 16.706.169.000,- dengan realisasi belanja sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp. 3.338.927.632,- atau 19.99%. Secara kinerja PPN Brondong mendapatkan Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 106,53 kategori **Baik** yang dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1 Tampilan Dashboard Kinerjaku PPN Brondong

Ketercapaian Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 106,53 didukung oleh tercapainya 8 capaian indikator kinerja meliputi :

- IK 1 - Penerimaan PNPB Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Rp. Juta)
- IK 2 - Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Ton)
- IK 4 - Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)

- IK 7 - Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)
- IK 8 - Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)
- IK 11 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)
- IK 14 - Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)
- IK 18 - Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)

Pengukuran kinerja berbasis BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian output) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian outcome). Capaian kinerja PPN Brondong Triwulan I Tahun 2026 dipengaruhi oleh adanya perencanaan, pelaksanaan kegiatan yang melibatkan seluruh komponen di PPN Brondong serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Dalam meningkatkan kinerja ke depan dipandang perlu ketersediaan SDM yang berkompeten dan sesuai dengan beban kerja di PPN Brondong, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan kinerja.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan perikanan tangkap, PPN Brondong melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu :

1. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.
2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara akuntabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dicapai, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan – permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang. Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai; dan
2. Menjadi dasar untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Wujud pelaporan kinerja dimaksud adalah Laporan Kinerja PPN Brondong yang disusun setiap tahun. Berkaitan dengan hal tersebut, Laporan Kinerja PPN Brondong

Triwulan I Tahun 2026 disusun untuk mengukur pencapaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja PPN Brondong Tahun 2026 dalam mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini adalah salah satu bentuk media pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan terhadap kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab bisa diwujudkan.

1.2. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, tugas PPN Brondong adalah melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut PPN Brondong menyelenggarakan fungsinya:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana program dan anggaran, serta pelaporan di bidang pelabuhan perikanan;
2. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
3. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
4. Pelaksanaan pemeriksaan *Logbook* penangkapan ikan;
5. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
6. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
7. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
8. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
9. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengelolaan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
10. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
11. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;

12. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik;
13. Pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
14. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
15. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

1.3. Struktur Organisasi dan SDM PPN Brondong

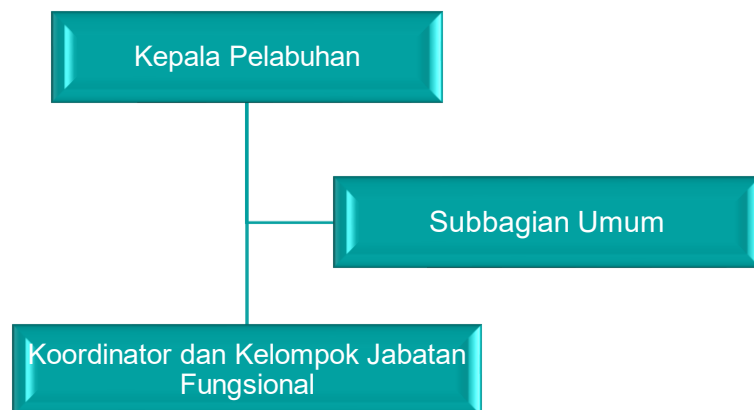
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi maka disusun struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara, sebagai berikut :

1.3.1. Subbagian Umum

Melakukan urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

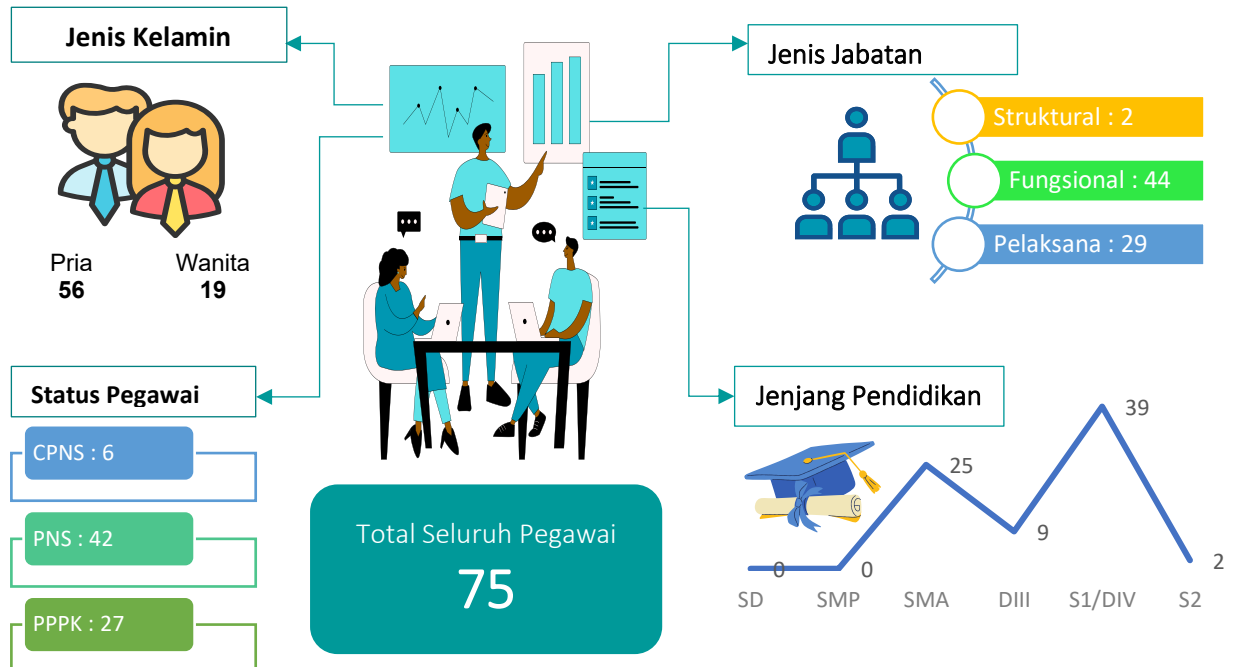
1.3.2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing. Dalam pelaksanaan tugas tersebut ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap. Tugas koordinator tersebut adalah mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.



Gambar 2 Struktur Organisasi PPN Brondong 2026

PPN Brondong di dukung oleh 75 orang pegawai yang terdiri atas PNS 42 orang (56%), CPNS 6 orang (8%), dan PPPK 27 orang (36%). Komposisi pegawai di PPN Brondong pada Tahun 2026 sebagai berikut :



Gambar 3 Komposisi Pegawai PPN Brondong Tahun 2026

1.4. Permasalahan

Secara umum perikanan tangkap memiliki permasalahan yang cukup kompleks yang disebabkan oleh banyak factor dan juga sensitive terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Permasalahan dalam pembangunan perikanan tangkap mencakup berbagai kelemahan yang terdapat di internal sistem perikanan tangkap maupun berbagai ancaman yang berasal dari luar sistem perikanan tangkap. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) permasalahan utama, yakni sebagai berikut:

- 1. Kapasitas nelayan;** Belum optimalnya kemampuan nelayan dalam menerapkan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan ramah lingkungan serta minimnya pengetahuan tentang cara penanganan ikan yang baik di atas kapal perikanan bagi sebagian nelayan.
- 2. Kesejahteraan nelayan:** Belum terpenuhinya kebutuhan dasar bagi sebagian keluarga nelayan yang disebabkan rendahnya kemampuan nelayan dalam pengelolaan keuangan dalam merespon kerentanan usaha penangkapan ikan.

3. **Mindset masyarakat perikanan tangkap;** Bagi sebagian nelayan, usaha penangkapan ikan masih terbatas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan jangka menengah, belum sampai sepenuhnya pada upaya mendukung industrialisasi ataupun menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.
4. **Sarana prasarana usaha penangkapan ikan;** Belum optimalnya pengembangan infrastruktur dan integrasi konektivitas sistem informasi antar pelabuhan perikanan, serta; masih rendahnya produktivitas armada perikanan, termasuk dalam hal pemenuhan kriteria laik tangkap dan laik simpan, tingkat pendataan kapal dan alat penangkapan ikan yang reliable, serta penyerapan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan efisien.
5. **Konektivitas analisis dan pemantauan pemanfaatan usaha;** Belum optimalnya konektivitas pemanfaatan usaha khususnya pada skala nelayan kecil, integrasi perizinan usaha antara pusatdaerah, maupun intensifikasi penggunaan sistem IT dalam pelaporan usaha.

1.5. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja PPN Brondong Tahun 2026 mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun sistematika laporan sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF	Ringkasan capaian kinerja PPN Brondong Tahun 2026
Bab I PENDAHULUAN	Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi
Bab II PERENCANAAN KINERJA	Ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	Capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian target kinerja.
Bab IV PENUTUP	Kesimpulan umum atas capaian Kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Bab V LAMPIRAN	Perjanjian Kinerja, penghargaan yang diraih atau dokumen lainnya.

Gambar 4 Bentuk dan Format Laporan Kinerja Tahun 2026

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2026

Penetapan kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dirumuskan dalam dokumen perjanjian kinerja yang berisi penugasan dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong untuk melaksanakan program dan kegiatan pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Perumusan perjanjian kinerja tahun 2026 dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja mengacu pada indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Adapun Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2026 adalah sebagaimana pada tabel 1.

Tabel 1 Perjanjian Kinerja PPN Brondong Tahun 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBPN sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	1	Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Rp.Juta)	2.345,12
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Ton)	58.000
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang optimal dan bertanggungjawab	3	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	100
		4	Tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	88
		5	Tingkat pelayanan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	95
		6	Persentase pengendalian pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	87
		7	Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	33
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	8	Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	826
		9	Tingkat pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan (Nilai)	0,28

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5	Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	10 Nilai PM pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	75,5
		11 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	86
		12 Penilaian Mandiri SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	88,2
		13 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)	84,5
		14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	77
		15 Persentase pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	82
		16 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	92,1
		17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	71,75
		18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	88,8

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, ditetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 2 Alokasi Anggaran PPN Brondong Tahun 2026

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	1.424.861.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	15.281.308.000
Total Anggaran Tahun 2025		16.706.169.000

2.2. Rencana Aksi Penetapan Kinerja

Rencana aksi merupakan penjabaran target kinerja yang digunakan sebagai alat monitoring berkala terhadap capaian indikator kinerja dan anggaran. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU Perspektif *Internal Process* dan *Learning and Growth* yang di sandingkan dengan indikator kegiatan pada pencapaian setiap bulannya sehingga didapat persentase pencapaian secara berkala. Sebagaimana pada tabel perbandingan capaian IKU dan Anggaran dibawah ini, sebagai tabel berikut:

Tabel 3 Rencana Aksi PPN Brondong Tahun 2026

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja PPN Brondong Triwulan I Tahun 2026 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja PPN Brondong Tahun 2026. Capaian kinerja PPN Brondong pada 8 indikator kinerja utama dengan hasil secara keseluruhan tercapai dengan nilai 106,53, dan capaian masing-masing Indikator Kinerja dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
			2026	TW I 2026	%
1	Nilai PNBP sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	1 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Rp.Juta)	1.100	1.496	135,99
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong meningkat	2 Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Ton)	8.000	9.749	121,86
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang optimal dan bertanggungjawab	4 Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	88	97	110,23
		7 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	33	4,73	14,33
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	8 Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	817	880	107,71
5	Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	86	100	116,28
		14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	77	100	129,87
		18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)	88,8	91,4	102,93

Berdasarkan capaian kinerja di atas maka dilakukan analisa terhadap pencapaian tersebut sehingga dapat memberikan data yang komprehensif sebagai bahan pengambilan kebijakan untuk kinerja organisasi ditahun berikutnya. Berikut ini

adalah capaian dari masing–masing Indikator Kinerja Utama Tahun 2026:

S.01 Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

IKS 01.1. Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. PNBP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada PPN Brondong terdapat 3 (tiga) jenis penerimaan yaitu pendapatan penggunaan sewa, tanah, gedung dan bangunan, pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi dan pendapatan jasa pelabuhan perikanan.

Tabel 5 Jenis Penerimaan PNBP di PPN Brondong

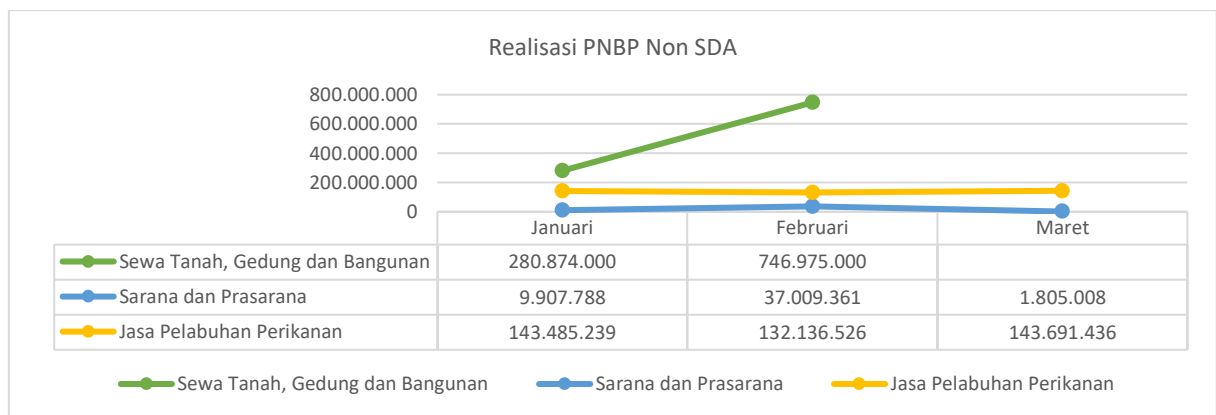
PNBP Sarana Dan Prasarana	PNBP Jasa Pelabuhan Perikanan
1. Penggunaan Tanah dalam Rangka Tusi Pelabuhan Perikanan Klaster 1; 2. Bangunan Permanen; 3. Pemeliharaan Prasarana; 4. Penumpukan Barang Terbuka Tidak Beratap; 5. Ruang Pertemuan/Aula AC Kapasitas 51 s.d 100 Orang; 6. Pelayanan Penggunaan Ruang Pendingin; 7. Penggunaan ABF (Frezeer); 8. Pelayanan Tangki Air dan Instalasinya; dan 9. Pelayanan Transportasi - Crane Truck.	1. Pelayanan Tambat Kapal Perikanan (>30 - 100 GT); 2. Pelayanan Tambat Kapal Perikanan (>5 - 30 GT); 3. Pemakaian Listrik yang Bersumber dari Daya milik PLN melalui Instalasi milik Pelabuhan Perikanan; 4. Pelayanan Pengadaan Air Berasal dari PDAM yang Dialirkan Melalui Pipa Dermaga/TPI; 5. Pelayanan bengkel; 6. Pelayanan jasa pas masuk harian; 7. Pelayanan jasa pas masuk berlangganan; dan 8. Pelayanan jasa kebersihan kolam pelabuhan, pertokoan/perkantorn, rumah makan kios, dan bangunan permanen tertutup

Pengukuran capaian indikator kinerja penerimaan PNBP Non SDA di PPN Brondong sesuai dengan manual IKU yaitu merupakan nilai PNBP Non SDA dari

sektor Perikanan Tangkap di tahun berjalan sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Capaian Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp 1.495.884.358,- sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 6 Capaian Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2026

Nama IKU	Target 2026	Triwulan I			% Terhadap Realisasi 2026
		Target	Realisasi	%	
Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Rp.Juta)	2.345,12	1.100	1.495,88	135,98	63,79



Gambar 5 Grafik Capaian Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2026

Tabel 7 Perbandingan Capaian Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Brondong Periode Sebelumnya

Nama IKU	Triwulan I			
	2025	2026	Selisih (+/-)	%
Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Rp.Juta)	463	1.495,88	1.032,88	223,08

Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Triwulan I Tahun 2026 mencapai Rp1.495,88 juta atau sebesar 135,98% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.100 juta dan sebesar 63,79% dari target Tahun 2026 sebesar Rp 2.345,12 juta. Capaian tersebut melebihi Rp 395,88 juta dari target Triwulan I Tahun 2026. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp 463 juta, capaian PNBP Non-SDA Tahun 2026 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp 1.032,88 juta atau 223,08%.

Kenaikan penerimaan PNBP Non SDA pada Triwulan I Tahun 2026 didorong oleh optimalisasi pemanfaatan sewa tanah, gedung dan bangunan, khususnya pada penyewaan gedung *cold storage*. Gedung cold storage berkapasitas 400 ton dan 100

ton memiliki nilai kontrak yang lebih tinggi dibandingkan gedung lainnya, sehingga kontribusinya terhadap penerimaan PNBP jauh lebih dominan. Besarnya biaya sewa ini mencerminkan tingginya valuasi aset strategis tersebut, sehingga meskipun jumlah objek sewa terbatas, nilai penerimaan yang dihasilkan mampu melampaui target PNBP secara keseluruhan.

Dalam mendukung capaian tersebut, telah dilakukan optimalisasi pemanfaatan penyewaan tanah, gedung dan bangunan, khususnya cold storage, serta peningkatan pengelolaan kontrak sewa untuk memastikan penerimaan dapat terealisasi secara maksimal. Upaya peningkatan capaian PNBP Non-SDA pada periode berikutnya difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan aset non-SDA lainnya, seperti tambat labuh dan jasa kepelabuhanan

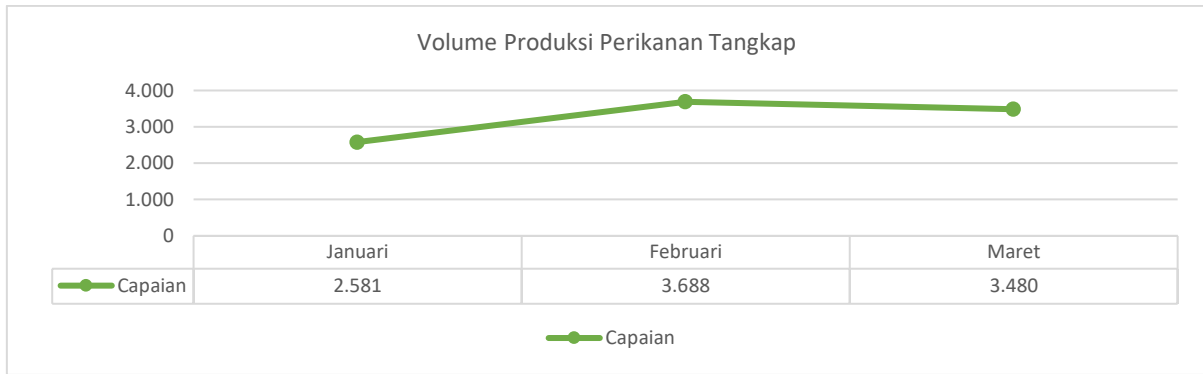
S.02 Produktivitas Perikanan Tangkap Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Meningkat

IKS 02.1. Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Ton)

Produksi perikanan tangkap mencakup hasil penangkapan ikan, binatang air, dan tanaman air dari sumber perikanan alami yang bukan milik perorangan. Hasil produksi, baik yang dijual maupun yang dibayar sebagai upah, berasal dari kapal penangkap ikan yang didaratkan di PPN Brondong. Proses pengumpulan data dilakukan oleh enumerator setiap hari dengan mencatat hasil tangkapan, yang kemudian diolah oleh petugas untuk menghasilkan data volume produksi yang divalidasi. Kinerja diukur dengan membandingkan realisasi dengan target; pencapaian dinyatakan berhasil jika realisasi sama dengan atau lebih besar dari target. Pada Triwulan I Tahun 2026, volume produksi perikanan tangkap di PPN Brondong mencapai 9.749 ton.

Tabel 8 Capaian Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2026

Nama IKU	Target 2026	Triwulan I			% Terhadap Realisasi 2026
		Target	Realisasi	%	
Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Ton)	58.000	8.000	9.749	121,86	16,81



Gambar 6 Grafik Capaian Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2026

Tabel 9 Perbandingan Capaian Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Brondong Periode Sebelumnya

Nama IKU	Triwulan I			
	2025	2026	Selisih (+/-)	%
Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Ton)	14.220	9.749	-4.471	-31,44

Volume produksi perikanan tangkap di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2026 mencapai 9.749 ton atau sebesar 121,86% dari target yang ditetapkan sebesar 8.000 ton dan sebesar 16,81% dari target Tahun 2026 sebesar 58.000 ton. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 sebesar 14.220, capaian volume produksi perikanan tangkap mengalami penurunan sebesar 4.471 atau 31,44%.

Penurunan tersebut dipengaruhi kondisi cuaca dan pergeseran musim yang berdampak pada ketersediaan sumber daya ikan dan volume produksi yang didaratkan serta terdapat libur panjang terkait hari raya idul fitri 1447 H di bulan Maret yang menyebabkan banyak kapal yang libur tidak melakukan kegiatan melaut beberapa hari. Kedua hal ini mempengaruhi jumlah kapal yang melakukan kunjungan untuk melakukan kegiatan pembongkaran ikan di PPN Brondong disamping perolehan tangkapannya yang kurang begitu besar akibat cuaca sehingga secara otomatis membuat jumlah produksi ikan yang didaratkan di PPN Brondong lebih sedikit dibandingkan dengan tahun kemarin di periode yang sama yaitu triwulan I. Namun demikian, capaian produksi pada Triwulan I Tahun 2026 tetap tinggi karena didukung oleh dominasi hasil tangkapan dari jenis ikan unggulan, seperti kurisi/pasir-pasir, ikan mata besar/swangi, dan ikan biji nangka/kuniran, yang menunjukkan ketersediaan sumber daya ikan yang masih cukup melimpah meskipun cuaca/musim penangkapan tidak terlalu baik. Selain itu, tingginya intensitas aktivitas penangkapan, baik dari sisi jumlah trip kapal maupun frekuensi pendaratan ikan, turut berkontribusi terhadap capaian tersebut. Seluruh capaian tersebut juga diperkuat oleh sistem

pendataan/pencatatan kegiatan bongkar di pelabuhan yang dilaksanakan dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan volume produksi pada periode berikutnya, diperlukan penyediaan informasi terkait musim dan daerah penangkapan ikan guna mendukung aktivitas nelayan yang lebih terarah dan efektif. Selain itu, kelancaran operasional pelabuhan perlu terus dijaga, khususnya pada aspek bongkar muat dan pencatatan, agar tidak menghambat proses pendaratan hasil tangkapan.

S.03 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang Optimal dan Bertanggungjawab

IKS 03.1. Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)

Pelabuhan perikanan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :08/MEN/2012 memiliki 2 fungsi yaitu sebagai fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan. Fungsi pemerintahan pada pelabuhan perikanan yaitu melakukan pembinaan dan pengolahan, melakukan pengumpulan data dan publikasi, melaksanakan fungsi karantina ikan, serta tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan, melaksanakan kegiatan kapal perikanan, melakukan publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal penelitian kelautan dan perikanan, melakukan pemantauan dan pengendalian lingkungan, dan melaksanakan kesyahbandaran, kepabebaran, dan/atau keimigrasian. Sedangkan fungsi perusahaan, pelabuhan sebagai pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan, bongkar muat ikan, pengolahan hasil perikanan, perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan, serta logistik dan perbekalan kapal pemasaran dan distribusi ikan, pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan, penyediaan jasa kelautan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan fungsi perusahaan terutama dalam pemanfaatan fasilitas dan lahan di Pelabuhan Perikanan perlu dilakukan proses analisa atau evaluasi terhadap permohonan perusahaan dalam rangka menghindari resiko yang terjadi kedepannya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Triwulan I Tahun 2026, IKU Persentase Permohonan Perusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)

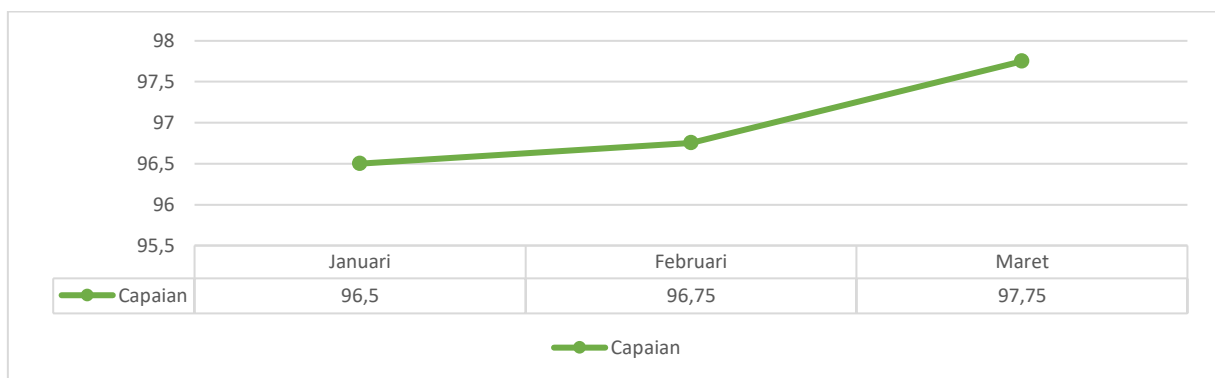
tidak dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dilakukan secara tahunan.

IKS 03. 2. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)

Pelabuhan perikanan harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu dalam pemenuhan fasilitas maupun pelayanan yang merupakan indikator/ parameter bagi keberhasilan capaian kinerja pelabuhan perikanan. Kinerja operasional pelabuhan perikanan berkaitan dengan segala aktivitas operasional yang ada di pelabuhan perikanan mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, pemasaran ikan dan pengawasan sumber daya ikan. Tingkat kinerja operasional pelabuhan perikanan didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional sesuai dengan kelas pelabuhan perikanan yang terdiri : a) administrasi dan sistem informasi, b) fasilitas pelabuhan perikanan, c) pelayanan umum, dan d) investasi dan industri. Capaian indikator tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Triwulan I Tahun 2026 sebesar 97.

Tabel 10 Capaian Tingkat Kinerja PPN Brondong Triwulan I Tahun 2026

Nama IKU	Target 2026	Triwulan I			% Terhadap Realisasi 2026
		Target	Realisasi	%	
Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	88	88	97	110,23	110,23



Gambar 7 Grafik Capaian Tingkat Kinerja di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2026

Tabel 11 Perbandingan Capaian Tingkat Kinerja di PPN Brondong Periode Sebelumnya

Nama IKU	Triwulan I			
	2025	2026	Selisih (+/-)	%
Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	91,91	97	5,09	5,54

Tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Triwulan I Tahun 2026 mencapai 97 atau sebesar 110,23% dari target yang ditetapkan sebesar 88 dan sebesar 110,23% dari target Tahun 2026 sebesar 88. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 sebesar 91,91, capaian tingkat kinerja Triwulan I Tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar 5,09 atau 5,54%.

Nilai kinerja Pelabuhan pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan tren peningkatan yaitu pada bulan Januari sebesar 96,65, Februari sebesar 96,75, dan Maret sebesar 97,75. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan, monitoring dan evaluasi kinerja telah berjalan dengan baik dan peningkatan kinerja secara konsisten. Capaian tersebut juga didukung oleh pemenuhan indikator penilai sebanyak 27 faktor yang dinilai, mayoritas telah mencapai nilai maksimal.

Upaya yang perlu dilakukan adalah mempertahankan penilaian indikator yang telah mencapai nilai maksimal serta meningkatkan penilaian indikator yang belum optimal.

IKS 03. 3. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)

Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di pelabuhan perikanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan. Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang yaitu: (1) mengatur kedatangan kapal perikanan, (2) memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan, (3) menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan, (4) mengatur keberangkatan kapal perikanan, (5) menerbitkan Surat Tanda Bukti Keberangkatan Kapal Perikanan, (6) menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar, (7) memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan, (8) memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut, (9) memeriksa logbook penangkapan ikan, (10) mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan, (11) mengawasi pemanduan, (12) mengawasi pengisian bahan bakar, (13) mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan, (14) melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan, (15) memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan, (16) mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim, (17) pemenuhan

persyaratan pengawakan kapal perikanan, dan (18) memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.

Dalam mengukur tingkat pelayanan kesyahbandaran di PPN Brondong pada Tahun 2026 melalui 3 (tiga) indikator pelayanan administrasi pada tugas dan wewenang syahbandar di pelabuhan perikanan yang meliputi:

1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (bobot 40%),
2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%).
3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%).

Pada Triwulan I Tahun 2026, IKU Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen) tidak dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dilakukan secara tahunan.

IKS 03.4. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)

Pengembangan aktivitas atau usaha perikanan di pelabuhan perikanan sering tidak diimbangi dengan pengembangan fasilitasnya sehingga menghambat terlaksananya aktivitas pelabuhan perikanan secara optimal. Pengembangan fasilitas ini penting dilaksanakan agar aktivitas dapat dilakukan secara optimal. Sarana dan prasarana yang ada terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu fasilitas pokok yang merupakan fasilitas utama yang harus ada di Pelabuhan Perikanan, fasilitas fungsional untuk memberikan pelayanan dan manfaat langsung yang diperlukan untuk kegiatan operasional, dan fasilitas penunjang yang merupakan fasilitas tambahan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan.

Pada Triwulan I Tahun 2026, IKU Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen) tidak dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dilakukan secara tahunan.

IKS 03. 5. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)

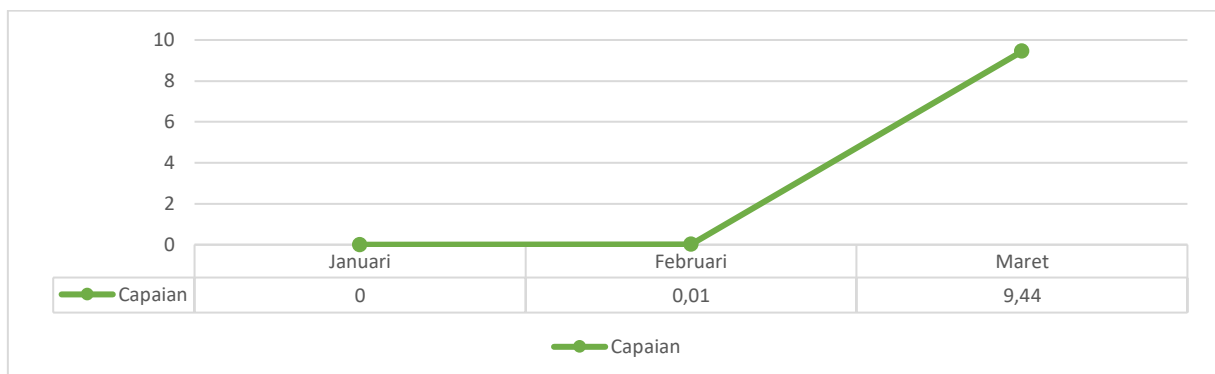
Dalam kegiatan operasional di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dianggap perlu untuk ditinjau mengenai aspek lingkungan hidup sebagai kendali terhadap prakiraan terjadinya dampak pencemaran lingkungan dan perubahan di

berbagai aspek, antara lain : aspek fisika-kimia (seperti : penurunan kualitas udara ambient, peningkatan kebisingan, penurunan kualitas air permukaan, penurunan kualitas air laut, peningkatan air larian); aspek biologi (seperti : gangguan biota air); dan aspek sosial ekonomi dan budaya (seperti : gangguan lalu lintas darat, gangguan lalu lintas perairan, peningkatan kesempatan kerja dan peluang berusaha, perubahan persepsi masyarakat, timbulan limbah padat dan limbah bahan berbahaya dan beracun) yang pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengelolaan bekerjasama dengan pihak instansi atau pihak terkait yang dilakukan secara rutin dan periodik melaksanakan pemantauan langsung ke lapangan untuk menguji baku mutu kandungan parameter perihal kegiatan tersebut.

SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang diperbaharui berkala dan dicantumkan dalam bentuk skor Pelabuhan. Pada Tahun 2025 skor PPN Brondong dalam pelaksanaan program lingkungan hingga pencapaian kualitas lingkungan sebesar 4,73 dengan kategori **Kurang**.

Tabel 12 Capaian Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2026

Nama IKU	Target 2026	Triwulan I			% Terhadap Realisasi 2026
		Target	Realisasi	%	
Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	33	33	4,73	14,33	14,33



Gambar 8 Grafik Capaian Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2026

Tabel 13 Perbandingan Capaian Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Brondong Periode Sebelumnya

Nama IKU	Triwulan I			
	2025	2026	Selisih (+/-)	%

Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	87,96	4,73	-83,23	-94,62
---	-------	------	--------	--------

Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Triwulan I Tahun 2026 mencapai 4,73 atau sebesar 14,33% dari target yang ditetapkan sebesar 33 dan sebesar 14,33% dari target Tahun 2026 sebesar 33. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 sebesar 87,96, capaian nilai pengendalian lingkungan Triwulan I Tahun 2026 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 83,23 atau 94,62%.

Penurunan capaian tersebut disebabkan belum optimalnya koordinasi internal tim pengendalian lingkungan, khususnya terkait pembaruan aplikasi yang digunakan dalam proses penilaian. Kondisi ini mengakibatkan keterlambatan dalam pengunggahan data dukung, sehingga berdampak pada rendahnya nilai yang diperoleh pada Triwulan I.

Sebagai tindak lanjut, perlu dilakukan peningkatan koordinasi dan komunikasi baik secara internal maupun eksternal, serta penguatan pemahaman terhadap penggunaan dan pembaruan aplikasi. Selain itu, diperlukan peningkatan kedisiplinan dalam pemenuhan dan pengunggahan dokumen pendukung secara tepat waktu guna mendukung peningkatan capaian kinerja pada periode berikutnya.

S.04 Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

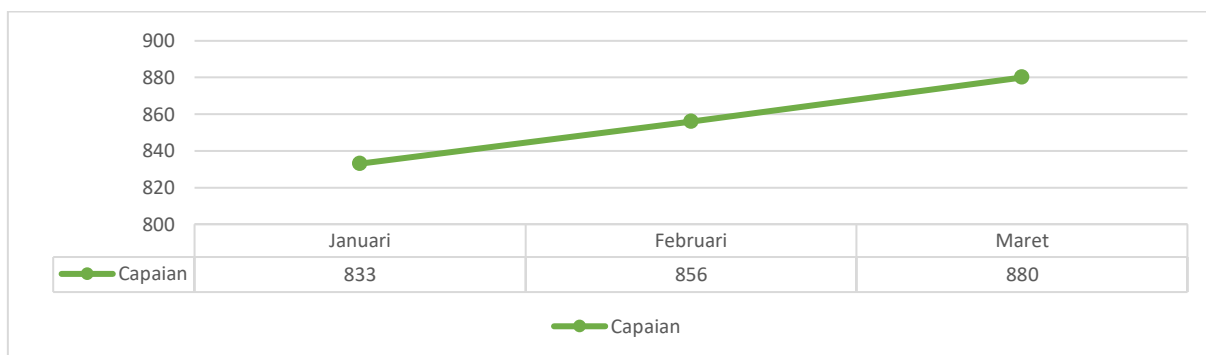
IKS 04.1. Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)

Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan merupakan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) yaitu surat kapal yang menyatakan bahwa kapal perikanan memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan dan kelaiksimpanan dalam rangka keselamatan pelayaran. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) dengan menggelar gerai pelayanan di setiap daerah. Akselerasi ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan prima dalam memfasilitasi nelayan dan pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Akselerasi KKP sebagai upaya pemerintah memberikan pelayanan prima diwujudkan dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.578/MEN-KP/VII/2022 tentang Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) Dalam Masa Transisi, kebijakan tersebut didasarkan atas pertimbangan dengan pengalihan penerbitan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan dan Sertifikat Keselamatan Barang dari Kementerian Perhubungan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Logbook Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan. PPN Brondong sebagai salah satu UPT pelaksana kebijakan pada Tahun 2026 telah menerbitkan sebanyak 880 dokumen SKKP sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 14 Capaian Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2026

Nama IKU	Target 2026	Triwulan I			% Terhadap Realisasi 2026
		Target	Realisasi	%	
Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	826	817	880	107,71	106,54



Gambar 9 Grafik Capaian Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2026

Tabel 15 Perbandingan Capaian Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan Periode Sebelumnya

Nama IKU	Triwulan I			
	2025	2026	Selisih (+/-)	%
Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	588	880	292	49,66

Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Triwulan I Tahun 2026 mencapai 880 atau sebesar 107,71% dari

target yang ditetapkan sebesar 817 dan sebesar 106,54% dari target Tahun 2026 sebesar 826. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 sebesar 588, capaian Triwulan I Tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar 292 atau 49,66%.

Peningkatan capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan tingkat kesadaran dan kepatuhan administrasi perizinan kapal perikanan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha, khususnya pada Pelabuhan binaan PPN Brondong, semakin memahami pentingnya legalitas operasional dan kelengkapan dokumen sebagai bagian dari keberlanjutan usaha perikanan. Selain itu, intensitas sosialisasi dan pembinaan yang mendorong peningkatan pemahaman pelaku usaha, kemudahan akses layanan perizinan baik secara *offline* maupun *online* serta dukungan stakeholder dan pengawasan yang konsisten. Pendekatan persuasif melalui kegiatan jemput bola ke pelabuhan binaan, serta pemutakhiran data kapal guna memastikan keakuratan status perizinan juga mempengaruhi peningkatan capaian ini.

Upaya yang perlu dilakukan adalah mempertahankan dan meningkatkan kegiatan sosialisasi secara berkala, mengoptimalkan layanan perizinan agar lebih cepat dan mudah diakses, serta memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap kapal yang belum berizin. Penguatan koordinasi antar stakeholder dan pemberian edukasi berbasis kasus juga diperlukan guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha secara berkelanjutan.

IKS 04.2. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)

Pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Logbook Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat pelaksanaan tata kelola Pengawakan Kapal Perikanan dengan menerbitkan surat edaran Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024 tentang Layanan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dan Relaksasi Kebijakan Pemenuhan Persyaratan Kerja bagi Awak Kapal Perikanan pada Kapal Perikanan Berbendera Indonesia. Tujuan implementasi indikator ini adalah

untuk menjamin kepatuhan regulasi serta meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan awak kapal perikanan.

Pada Triwulan I Tahun 2026, IKU Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai) tidak dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dilakukan secara semesteran.

S.05 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

IKS 05.1. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas mencakup dua komponen, yaitu pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit merupakan aspek tata kelola (*governance*) internal unit kerja dan komponen hasil merupakan bagaimana stakeholder merasakan dampak/hasil dari perubahan yang telah dilakukan pada area pengungkit. Pelaksanaan pembangunan ZI di PPN Brondong ditetapkan dengan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong melalui SK KPA.

Pada Triwulan I Tahun 2026, IKU Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai) tidak dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dilakukan secara tahunan.

IKS 05. 2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)

Tindak lanjut adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh auditan dalam rangka memperbaiki kelemahan pengendalian yang telah diidentifikasi oleh auditor dalam bentuk saran dan/atau rekomendasi dalam LHP. Tindak lanjut dalam hal ini diharapkan tidak sekedar sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, namun yang lebih penting lagi adalah sebagai bentuk upaya peningkatan

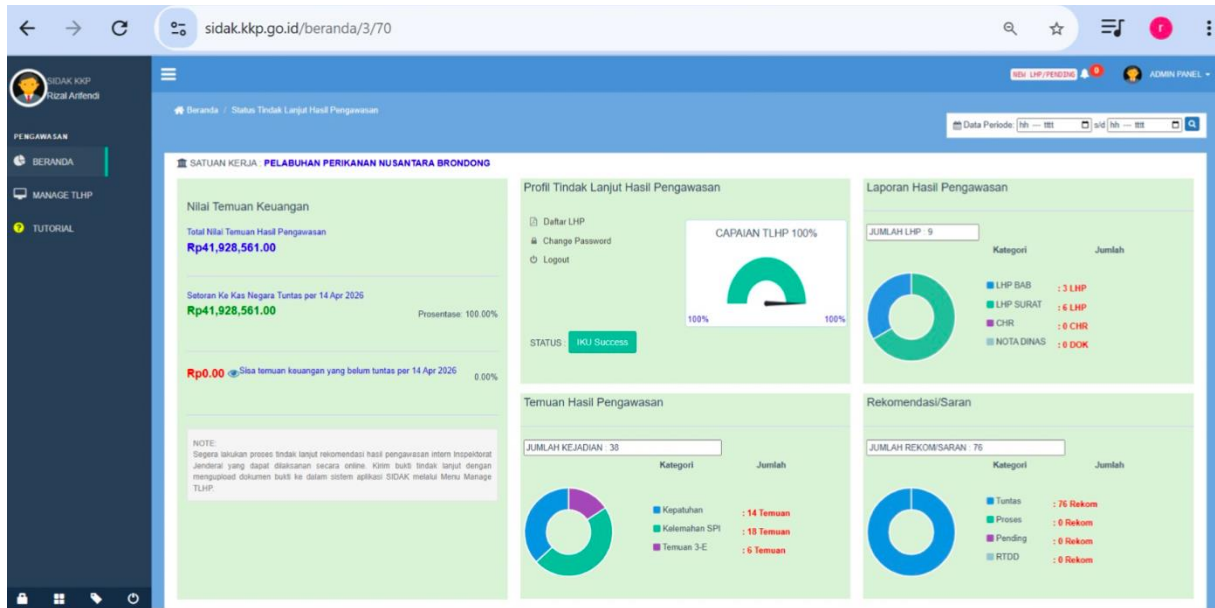
kinerja auditan yang menindaklanjuti. Hal tersebut dikarenakan, rekomendasi/saran yang diberikan dalam LHP adalah untuk perbaikan atas kelemahan manajemen maupun untuk peningkatan kinerja satker terkait, dengan demikian, ada korelasi antara pelaksanaan tindak lanjut dengan peningkatan kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan Peraturan Irjen KKP Nomor 209/PER-IRJEN/2018, tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan/atau Pemeriksaan di lingkungan KKP, sebagaimana pada Pasal 20 PerMenKP Nomor 29/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa auditor dan/atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemantauan tindak lanjut, guna mengetahui perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. Disisi lain, pada Pasal 25 PERMENKP Nomor 29/PERMEN-KP/2014 disebutkan antara lain bahwa Auditi wajib menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal dalam waktu 30 hari kerja setelah laporan Pengawasan Intern diterima dengan dilengkapi bukti-bukti pendukungnya. Untuk itu, semestinya, sudah menjadi kewajiban auditi, tanpa dipantau pun harus melaksanakan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen KKP.

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan IV Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan mencapai 100% berstatus tuntas ditindaklanjuti dan dimanfaatkan. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)

Tabel 16 Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2026

Nama IKU	Target 2026	Triwulan I			% Terhadap Realisasi 2026
		Target	Realisasi	%	
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	86	100	100	116,28	116,28



Gambar 10 Status Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Aplikasi SIDAK

Tabel 17 Perbandingan Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di PPN Brondong Periode Sebelumnya

Nama IKU	Triwulan I			
	2025	2026	Selisih (+/-)	%
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	100	100	0	0

Capaian IKU persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Brondong Triwulan I Tahun 2026 melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar 86 dengan realisasi mencapai 100 atau 116,28%. Jika dibandingkan dengan capaian periode sebelumnya, maka capaian Triwulan I Tahun 2026 adalah sama yaitu sebesar 100%. Indikator ini mulai ditetapkan sejak Tahun 2022 dengan hasil seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan dalam perbaikan kinerja organisasi.

Pencapaian IKU persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Tahun 2026 didukung oleh koordinasi dengan instansi terkait dalam progres tindak lanjut, Permasalahan yang masih dihadapi adalah belum optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Sebagai rekomendasi tindak lanjut, diperlukan optimalisasi monitoring dan evaluasi berkala terhadap tindak lanjut hasil pengawasan di PPN Brondong.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yaitu ketatalaksanaan organisasi.

IKS 05. 3. Penilaian Mandiri SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara akuntabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dicapai, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan – permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang. Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni : (1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai; dan, (2) Menjadi dasar untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan SAKIP pada PPN Brondong pada Tahun 2025 didasarkan oleh Surat Tugas Nomor B.12/PPNBR/KP.440/I/2025 tentang Penugasan Tim SAKIP Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Pengukuran kinerja SAKIP dilaksanakan menggunakan pedoman evaluasi yang telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Triwulan I Tahun 2026, IKU Penilaian Mandiri SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong tidak dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dilakukan secara tahunan.

IKS 05.4. Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)

Menurut UU No 5 Tahun 2014, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

Pada Triwulan I Tahun 2026, IKU Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong tidak dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dilakukan secara semesteran.

IKS 05. 5. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)



Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seringkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di (nama satker). Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan unit kerja mandiri. Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Pada Triwulan I Tahun 2026, pengukuran capaian kinerja IK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen) sebesar 100%.



**REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM
PENGADAAN TRIWULAN 1 TAHUN ANGGARAN 2026 LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

No	Kode E1	Nama Unit Eselon I	I Satker	Persentase RUP Terumumkan					Keterangan	Capaian IKU TW - 1 TA. 2026	
				% Pagu Pengadaan	% Pagu Terumumkan	% Selisih Terumumkan	% RUP Terumumkan			% Target IKU TW 1	% Capaian
1	01	Sekretariat Jenderal	3	470,068,437,000	470,068,437,000	0	100.0000%	Sesuai		85.00	100.00%
2	13	Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	47	304,871,258,000	304,871,258,000	0	100.0000%	Sesuai		77.00	100.00%
3	08	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	1	50,518,334,000	50,518,334,000	0	100.0000%	Sesuai		75.00	100.00%
4	05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	758,474,978,000	758,474,978,000	0	100.0000%	Sesuai		77.00	100.00%
5	12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	42	326,938,554,000	326,938,554,000	0	100.0000%	Sesuai		77.00	100.00%
6	03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	6,234,837,443,000	6,234,837,443,000	0	100.0000%	Sesuai		77.00	100.00%
7	02	Inspektorat Jenderal	1	15,127,914,000	15,127,743,000	(171,000)	99.9989%	Kurang Terumumkan		77.00	99.99%
8	06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	158,066,570,000	158,069,244,000	2,674,000	100.0017%	Lebih Terumumkan		77.00	99.99%
9	07	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	5	1,172,905,904,000	1,166,768,126,000	(6,137,778,000)	99.4767%	Kurang Terumumkan		76.00	99.48%
10	04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	917,960,850,000	897,634,697,000	(20,326,153,000)	97.7857%	Kurang Terumumkan		77.00	97.79%
TOTAL			156	10,409,770,242,000	10,383,308,814,000	(26,461,428,000)	99.7458%	KURANG TERUMUMKAN		99.75%	CAPAIAN MELEBIHI TARGET

(03) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap – 24 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	PAGU PENGADAAN TOTAL			
03	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP		6,234,837,443,000	6,234,837,443,000			
1	239150	BBPI SEMARANG	4,266,256,000	4,266,256,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	622461	PPN AMBON	2,888,215,000	2,888,215,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	427692	PPN BRONDONG	5,550,267,000	5,550,267,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	239146	PPN KARANGANTU	4,975,865,000	4,975,865,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	622482	PPN KEJAWANAN	76,447,767,000	76,447,767,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
6	310719	PPN KWANDANG	3,808,313,000	3,808,313,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	239171	PPN PEKALONGAN	2,624,978,000	2,624,978,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	560393	PPN PELABUHAN RATU	4,966,852,000	4,966,852,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	239991	PPN PEMANGKAT	2,169,663,000	2,169,663,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	633693	PPN PENGAMBENGAN	277,833,054,000	277,833,054,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	427670	PPN PRIGI	2,946,640,000	2,946,640,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	560401	PPN SIBOLGA	3,526,343,000	3,526,343,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	239214	PPN SUNGAILIAT	3,715,198,000	3,715,198,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	239221	PPN TANJUNG PANDAN	1,437,176,000	1,437,176,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	427661	PPN TERNATE	4,335,453,000	4,335,453,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
16	622475	PPN TUAL	2,121,021,000	2,121,021,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
17	239235	PPP TELUK BATANG	2,044,222,000	2,044,222,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
18	427655	PPS BELAWAN	8,432,114,000	8,432,114,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
19	633707	PPS BITUNG	10,659,664,000	10,659,664,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
20	531488	PPS BUNGUS	1,676,910,000	1,676,910,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
21	518117	PPS CILACAP	10,461,664,000	10,461,664,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
22	537695	PPS KENDARI	43,633,886,000	43,633,886,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
23	537611	PPS NIZAM ZACHMAN	29,534,068,000	29,534,068,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
24	238720	SETDITJEN PERIKANAN TANGKAP	5,724,781,854,000	5,724,781,854,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

Gambar 11 Rekapitulasi Tingkat Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Triwulan I Tahun 2026

Tabel 18 Capaian Tingkat Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2026

Nama IKU	Target 2026	Triwulan I			% Terhadap Realisasi 2026
		Target	Realisasi	%	
Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	77	77	100	129,87	129,87

Tabel 19 Perbandingan Capaian Tingkat Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Brondong Periode Sebelumnya

Nama IKU	Triwulan I			
	2025	2026	Selisih (+/-)	%

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	100	100	0	0
--	-----	-----	---	---

Berdasarkan Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan I Tahun 2026, PPN Brondong berhasil mencapai sebesar 100% dengan tingkat ketercapaian IKU sebesar 129,87%, melebihi target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian periode sebelumnya, maka capaian Triwulan I Tahun 2026 adalah sama yaitu sebesar 100%.

Capaian ini didukung oleh perencanaan pengadaan yang selaras dengan pagu anggaran pada lingkup PPN Brondong, ketepatan waktu pengumuman melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), serta kelengkapan dan validitas data paket yang sesuai. Perlu dilakukan penguatan konsistensi pengumuman RUP di awal tahun anggaran, peningkatan kualitas data yang lebih detail dan akurat, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi.

IKS 05. 6. Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup PPN Brondong merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPN Brondong dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan/ permasalahan, dan bahkan menjadi temuan berulang aparat pengawasan internal maupun eksternal. Pengukuran kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur sebagai berikut (1) tingkat pemanfaatan rencana kebutuhan BMN (RKBMN), (2) tersedianya usulan PSP BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST, (3) tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset), (4) penggunaan bmn hasil pengadaan belanja modal di dukung berita acara serah terima (BAST)/berita acara pemakaian, dan (5) penyusunan laporan BMN (semesteran dan

tahunan) secara tepat waktu. Metode pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan sehingga capaian dinyatakan tercapai jika realisasi lebih besar atau sama dengan target, dan bila realisasi lebih kecil maka kinerja tidak tercapai.

Pada Triwulan I Tahun 2026, IKU Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong tidak dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dilakukan secara tahunan.

IKS 05. 7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pengukuran dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek meliputi (1) kualitas perencanaan anggaran, (2) kualitas pelaksanaan anggaran, dan (3) kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Jumlah indikator kinerja yang dilakukan pengukuran dalam IKPA sebanyak 8 (delapan) yaitu (1) revisi DIPA, (2) Deviasi halaman III DIPA, (3) data kontrak, (4) penyelesaian tagihan, (5) pengelolaan UP dan TUP, (6) dispensasi SPM, (7) penyerapan anggaran, dan (8) capaian output. Metode pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan sehingga capaian dinyatakan tercapai jika realisasi lebih besar atau sama dengan target, dan bila realisasi lebih kecil maka kinerja tidak tercapai.

Pada Triwulan I Tahun 2026, IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong tidak dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dilakukan secara semesteran.

IKS 05. 8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023

tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran. Perlu menetapkan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) atau biasa disebut Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebagai Indikator Kinerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (K/L) diperoleh dari penggabungan 50% nilai kinerja perencanaan anggaran dan 50% nilai kinerja pelaksanaan anggaran.

- Nilai Kinerja Anggaran > 90 persen sampai dengan 100 persen dikategorikan Sangat Baik;
- Nilai Kinerja Anggaran > 80 persen sampai dengan 90 persen dikategorikan Baik;
- Nilai Kinerja Anggaran > 60 persen sampai dengan 80 persen dikategorikan Cukup atau Normal;
- Nilai Kinerja Anggaran > 50 persen sampai dengan 60 persen dikategorikan Kurang;
- Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50 persen dikategorikan Sangat Kurang;

Pada Triwulan I Tahun 2026, IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong tidak dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dilakukan secara tahunan.

IKS 07. 9. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Hasil penilaian

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2026 sebagai berikut :

Hasil Penyelenggaraan SKM Triwulan I tahun 2026 lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Unit Pelayanan Publik	Jumlah Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Hasil SKM
Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang	83	3,687	3,675	3,723	3,759	3,711	3,675	3,699	3,711	3,711	92,64
Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	68	3,735	3,809	3,765	3,750	3,706	3,603	3,779	3,824	3,794	93,79
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	14	3,857	3,857	3,857	3,857	3,857	3,786	3,714	3,857	3,714	95,44
Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	242	3,595	3,587	3,562	3,562	3,558	3,562	3,554	3,537	3,529	89,02
PPN Ambon	98	3,776	3,878	3,765	3,806	3,755	3,867	3,837	3,765	3,816	95,18
PPN Brondong	210	3,776	3,738	3,710	3,695	3,724	3,629	3,686	3,519	3,429	91,40
PPN Karangantu	228	3,746	3,737	3,719	3,807	3,702	3,719	3,741	3,627	3,526	92,57
PPN Kejawanan	153	3,654	3,725	3,686	3,654	3,634	3,699	3,706	3,634	3,614	91,68
PPN Kwardang	450	3,878	3,896	3,816	3,842	3,776	3,782	3,809	3,789	3,773	95,44
PPN Palabuhanratu	173	3,711	3,723	3,665	3,642	3,717	3,676	3,711	3,682	3,723	92,36
PPN Pekalongan	86	3,907	3,837	3,860	3,907	3,814	3,884	3,907	3,849	3,663	96,19
PPN Pemangkat	141	3,801	3,801	3,794	3,844	3,809	3,780	3,830	3,837	3,823	95,33
PPN Pengambengan	164	3,652	3,652	3,591	3,683	3,659	3,549	3,659	3,616	3,579	90,67
PPN Prigi	129	3,744	3,705	3,674	3,690	3,690	3,659	3,713	3,682	3,698	92,38

Gambar 12 Hasil Penyelenggaraan SKM Triwulan I Tahun 2026 Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Tabel 20 Capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2026

Nama IKU	Target 2026	Triwulan I			% Terhadap Realisasi 2026
		Target	Realisasi	%	
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)	88,80	88,80	91,4	102,93	102,93

Tabel 21 Perbandingan Capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup PPN Brondong Periode Sebelumnya

Nama IKU	Triwulan I			
	2025	2026	Selisih (+/-)	%
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)	92,54	91,4	-1,14	-1,23

Capaian nilai survei kepuasan masyarakat di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2026 melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar 88,8 dengan realisasi mencapai 91,4 atau 102,93%. Namun jika dibandingkan dengan realisasi Triwulan I Tahun 2025 sebesar 92,54, capaian tingkat kinerja Triwulan I Tahun 2026 mengalami penurunan sebesar -1,14 atau -1,23%.

Capaian IKU tersebut didukung dengan melakukan pengecekan kondisi fasilitas secara berkala, memperbaiki sarana yang rusak, mencatat setiap laporan yang masuk, melakukan verifikasi, serta menindaklanjutinya sesuai dengan jenis

permasalahan serta meningkatkan kemampuan petugas melalui pelatihan atau pembinaan secara berkala.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap 9 unsur pelayanan diperoleh nilai rata-rata 3,66 kategori sangat baik dengan nilai tertinggi pada unsur persyaratan dengan nilai 3,78 dan nilai terendah pada unsur sarana dan prasarana dengan nilai 3,43, unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan nilai 3,52 dan unsur kompetensi pelayanan dengan nilai 3,63. Rekomendasi perbaikan dilakukan terhadap 3 unsur yang memiliki nilai terendah yaitu Kompetensi Pelayanan, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, serta Sarana dan Prasarana.

3.2. Realisasi Anggaran

PPN Brondong pada tahun 2026 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.706.169.000,- dengan realisasi belanja pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp. 3.338.927.632,- atau 19,99%. Rincian realisasi anggaran PPN Brondong pada Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 22 Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan PPN Brondong Triwulan I Tahun 2026

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)
2338 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	1.424.861.000	38.306.000	2.69
2342 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	15.281.308.000	3.300.621.632	21.60
Total	16.706.169.000	3.338.927.632	19.99

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja PPN Brondong pada Triwulan I Tahun 2026 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput dalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KINERJAKU), diperoleh Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 106,53% kategori **Baik**. Secara umum menunjukkan capaian kinerja yang baik, di mana sebagian besar indikator telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian dan perbaikan, khususnya pada aspek pengendalian lingkungan dan optimalisasi kinerja pada seluruh unit layanan. Oleh karena itu, upaya perbaikan dan penyempurnaan akan terus dilakukan secara berkelanjutan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah PPN Brondong menjadi wujud pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran program dan mengukur sejauh mana SAKIP telah diimplementasikan. Selanjutnya, optimalisasi kinerja akan terus ditingkatkan melalui penguatan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja, serta didukung oleh inovasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan sinergi dengan stakeholder guna mendorong peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 56
JAKARTA 10119 KOTAK POS 4130 JKP 0061
TELEPON (021) 5519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 5521782
LAMAR www.dkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Alimin

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Lotharia Latif

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

PIHAK PERTAMA
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Brondong


Lotharia Latif


Nur Alimin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Nilai PNBP sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	1. Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Rp. Juta)	2.345,12
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong meningkat	2. Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Ton)	58.000
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang optimal dan bertanggungjawab	3. Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	100
		4. Tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	88
		5. Tingkat pelayanan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	95
		6. Presentase pengendalian pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	87
		7. Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	33
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	8. Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	826
		9. Tingkat pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan (Nilai)	0,28
5	Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	10. Nilai PM pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	75,5
		11. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	86
		12. Penilaian Mandiri SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	88,2
		13. Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)	84,5
		14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	77
		15. Persentase pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	82
		16. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	92,1
		17. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	71,75
		18. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	88,8

DATA ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	1 424 861 000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	15 281 308 000
Total Anggaran Tahun 2026		16.706.169.000

Jakarta, 14 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Lotharia Latif

PIHAK PERTAMA
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Brondong


Nur Alimin



LAMPIRAN EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN 2026

[illegible]

[illegible]

Sasaran	Indikator Kinerja	Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Sesuai Target Lainnya	Target Kegiatan Berkala												Realisasi Kegiatan Berkala												Tindak Lanjut	Permasalahan	Rekomendasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
								Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okts	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okts	Nov	Des																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	18. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)	Tim Kerja Dukungan Manajemen	Pelaksanaan tata kelola dan operasional pengusahaan di pelabuhan perikanan			1													1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			



Brondong, 13 April 2026
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Brondong,